

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan terkait pekerja seks komersial atau kerap disebut PSK seperti tidak ada habisnya dan terjadi hampir sepanjang umur keberadaan PSK itu sendiri. Sejarah mencatat, bisnis prostitusi yang erat kaitannya dengan keberadaan PSK di Indonesia menemukan nafasnya pada masa kolonial, terlebih ketika Undang-Undang Agraria ditetapkan dan terus berlangsung hingga hari ini (Lamijo, 2006).

Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kementerian Sosial melansir jumlah PSK di seluruh lokalisasi yang ada di Indonesia berjumlah lebih dari 40.000 orang pada tahun 2013, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya (<https://m.tempo.co/read/news/2013/04/16/058473745/40-juta-psk-menghuni-lokalisasi-di-seluruh-indonesia>). Dengan angka tersebut, PSK ada dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terorganisasi di dalam lokalisasi maupun tidak terorganisasi, tidak terkecuali di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan angka mencapai 46 juta jiwa menurut data yang dilansir oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2011 (<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75>). Dari jumlah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa terdapat 5.535 tuna susila atau PSK yang ada di Jawa Barat pada tahun 2011 (www.keuskupanbandung.org/main/post/2514).

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kota dan kabupaten. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang kerap dianggap sebagai pemasok PSK adalah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan daerah pesisir yang dilalui oleh Jalur Pantai Utara (pantura) telah lama

dikenal sebagai pemasok PSK ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Batam, dan daerah lainnya. Dalam catatan Paguyuban Keluarga Besar Indramayu di Batam, terhimpun data sebanyak 6.300 perempuan Indramayu bekerja sebagai PSK di Batam (Dasgupta, 2006).

Berdasarkan pengamatan peneliti, denyut perekonomian di jalur pantura Indramayu sudah terasa begitu memasuki wilayah perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Kenyataan bahwa bisnis prostitusi pun turut mengambil posisi dalam perekonomian di jalur pantura Indramayu diperoleh peneliti dari keterangan dr. Bintang, salah seorang dokter di RS. Sentot Kec. Patrol Indramayu yang mengatakan bahwa keberadaan rumah makan dan warung di sekitar Jalur Pantura tidak lepas dari bayang-bayang bisnis prostitusi. Keterangan lain diperoleh peneliti dari masyarakat yang beraktivitas di sekitar Kecamatan Patrol Indramayu yang mengatakan bahwa tidak begitu sulit untuk menemukan warung-warung yang menyediakan layanan plus-plus (prostitusi) di jalur pantura Indramayu. Peneliti juga menemukan sebuah liputan terkait keberadaan PSK di sepanjang jalur Pantura yang dimulai dari Cikampek di Karawang dan berujung di Indramayu (<http://news.liputan6.com/read/266308/prostitusi-ala-pantura>).

Keberadaan PSK di Indramayu tidak terlepas dari sekelumit permasalahan yang menyertai keberadaannya. Ancaman penularan HIV-AIDS termasuk salah satu di antaranya. Data akumulasi penderita HIV-AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menyatakan, sejak tahun 1993 hingga Maret 2011 tercatat sebanyak 493 kasus HIV-AIDS terlapor dengan cara penularan melalui hubungan seksual secara bebas (www.aidsindonesia.or.id). Jumlah tersebut turut menyumbang angka HIV-AIDS di Jawa Barat yang mencapai 3.809 kasus terlapor hingga Juni 2011, yang mengantarkan Jawa Barat menempati posisi ketiga kasus HIV-AIDS terbanyak setelah DKI Jakarta dan Papua. Keterangan lain diperoleh peneliti dari konselor VCT (*voluntary counseling and testing*, yaitu konseling khusus HIV-AIDS), Ibu Titin, S.Psi, di Rumah Sakit

Bhayangkara Indramayu Bidokkes Polda Jawa Barat yang menjadi rujukan bagi pelayanan HIV-AIDS di Kabupaten Indramayu. Ia mengatakan bahwa angka HIV-AIDS di Indramayu tinggi di kalangan PSK. Dari angka tersebut sebagian besar adalah golongan usia produktif (usia 20-40). Hal senada juga terungkap dalam laporan Ditjend PP&PL Kemenkes RI tahun 2011 yang menunjukkan kelompok usia 20-29 tahun merupakan kelompok terbesar yang terkena HIV-AIDS, yakni sebanyak 12.288 kasus terlapor.

Berdasarkan hasil penelitian Gugus Tugas Trafiking di Indramayu terhadap 50 orang responden ditemukan bahwa sebanyak 48% responden memasuki dunia prostitusi pada usia 14 tahun dengan 54% di antaranya tidak menamatkan pendidikan di tingkat dasar. Soejono D (dalam Sovitriana & Sari, 2012) menyebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan mengapa seseorang menjadi PSK, antara lain faktor ekonomi (keinginan untuk dapat hidup mewah, kemiskinan, dan lain-lain), faktor sosiologis (seperti urbanisasi, keadaan sosial, dan lain-lain), serta faktor psikologis (rasa ingin balas dendam, malas bekerja, dan lain-lain).

Ketika seseorang memutuskan untuk berhenti menjadi PSK, ia kembali harus menghadapi persoalan yang tidak jauh dari ketiga faktor pendorong di atas, yaitu keterbatasan pendidikan, keterbatasan keterampilan, serta gaya hidup. Tidak hanya itu, ia kemudian akan menghadapi persoalan baru yaitu stigma dan label negatif yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap mantan PSK, juga ancaman infeksi menular seksual dan HIV-AIDS.

Ketidakberdayaan seorang mantan PSK untuk kembali berbaur di dalam masyarakat menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi ia harus bisa mandiri dan hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitarnya, namun di sisi lain, ia juga harus siap dengan diskriminasi yang seringkali diberikan kepadanya. Tidak jarang, pemberian label negatif dan diskriminasi yang dilakukan masyarakat menjadikan mantan PSK lebih tidak berdaya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat para mantan PSK berdaya dan tidak kembali pada pekerjaan mereka sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan modal produktif. Pemberian bantuan modal produktif ini dipandang sebagai salah satu solusi bagi persoalan di sekitar mantan PSK (<http://www.daerah.sindonews.com/read/698639/23/muhammadiyah-bekali-mantan-psk-rp5-juta>). Di sisi lain, di panti-panti rehabilitasi, para mantan PSK yang terjaring razia diberi beragam pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat memberdayakan para mantan PSK pasca berhenti dari profesinya.

Namun persoalan di sekitar mantan PSK tidak selesai dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan keterampilan. Seperti telah diulas sebelumnya, seorang mantan PSK masih harus berhadapan dengan label negatif yang disematkan masyarakat terhadap seorang mantan PSK. Pemberian label negatif secara konsisten dan terus menerus kepada mantan PSK dapat mempengaruhinya dalam mempersepsi diri. Hal yang lebih buruk akan terjadi apabila kemudian label-label negatif tersebut diinternalisasi oleh mantan PSK sebagai bagian dari konsep diri, yang mendorong pembentukan konsep diri yang negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Rohim (2010) dalam penelitiannya terhadap 11 orang mantan PSK, yang menunjukkan bahwa 5 dari 11 orang mantan PSK memiliki konsep diri negatif dan memiliki kecenderungan untuk kembali menjadi PSK.

Konsep diri yang merupakan suatu faktor kompleks dan penting dalam tingkah laku, disebut Mead (dalam Sobur, 2003) sebagai produk dari interaksi sosial yang dibentuk dari proses internalisasi dan pengorganisasian pengalaman-pengalaman psikologis. Konsep diri inilah yang mengarahkan individu untuk bertingkah laku dan membangun harapan-harapan dalam kehidupannya (Burns, 1993). Sebagai sebuah faktor penentu tingkah laku, konsep diri berkembang dan relatif akan menetap ketika individu menginjak usia dewasa. Dalam kaitannya dengan mantan PSK, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sekitar 75% dari

jumlah PSK adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang pada umumnya memasuki dunia prostitusi pada usia sekitar 17-21 tahun (Kartono, 1981). Pada usia ini, individu berada dalam masa dewasa muda yang secara teoritis dinilai sebagai masa persiapan menuju kedewasaan dan kematangan diri, termasuk dalam membentuk konsep diri.

Konsepsi-konsepsi mantan PSK mengenai dirinya tidak terbentuk begitu saja. Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bagaimana ia berhubungan dengan orang lain (Centi, dalam Rola 2006) dan bagaimana ia menginternalisasi serta mengorganisasi keseluruhan pengalaman psikologis yang terjadi pada dirinya. Rogers (dalam Burns, 1993) menyatakan perubahan pada konsep diri merupakan hasil dari proses belajar dan karenanya konsep diri merupakan proses yang berkembang seiring individu memperoleh pengalaman baru yang terintegrasikan.

Penghayatan mantan PSK terhadap pengalaman-pengalaman dalam hidup dan kesadarannya terhadap konsep diri merupakan suatu proses fenomenologis. Fenomenologi menekankan pada kesadaran, di mana setiap fenomena atau obyek harus dialami oleh kesadaran (Missiak & Sexton, 2009). Sebagai suatu metode dengan pendekatan yang subyektif, peneliti memandang metode ini tepat digunakan untuk menggali aspek-aspek konsep diri yang disadari dan dimaknai oleh mantan PSK. Dengan metode ini, mantan PSK diharapkan dapat memberikan pemaknaan terhadap keberadaan dirinya dengan berbagai pengalaman yang dialami. Sehingga diharapkan, konsep diri yang muncul adalah konsep diri yang keluar dan dimaknai secara sadar oleh mantan PSK.

Kesadaran mantan PSK terhadap konsep diri dan kompleks persoalan di sekitar dirinya merupakan bekal yang penting bagi seorang mantan PSK untuk dapat membuatnya lebih berdaya dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk bisa membantu mantan PSK dalam membangun kesadaran terhadap aspek-aspek konsep diri yang dimilikinya

serta menemukan faktor apa saja yang membentuk konsep diri tersebut melalui penelitian yang diberi judul “Konsep Diri pada Mantan PSK dengan HIV Positif (Studi Fenomenologi terhadap Mantan PSK dengan HIV Positif di Kabupaten Indramayu)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada aspek konsep diri yang dimaknai serta factor pembentuk konsep diri pada mantan PSK dengan HIV positif di Kabupaten Indramayu dengan merujuk pada teori Burns.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek konsep diri yang dimaknai oleh mantan PSK dengan HIV positif di Kabupaten Indramayu serta mengetahui faktor-faktor yang membentuk konsep diri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konsep diri yang dimiliki oleh mantan PSK terinfeksi HIV-AIDS, serta memperkaya khazanah bagi keilmuan Psikologi Sosial, terutama terkait teori-teori konsep diri dan kajian-kajian mengenai PSK dan HIV-AIDS.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu pemberdayaan perempuan (terutama mantan PSK) maupun pihak-pihak yang bersinggungan dengan penanggulangan HIV-AIDS, khususnya di Kabupaten Indramayu, sehingga program-program pemberdayaan dapat lebih tepat menyorot pada akar masalah.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam lima bagian yang disusun dengan organisasi sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan secara teoritik mengenai konsep diri, PSK, serta konsep-konsep terkait HIV-AIDS.

Bab ketiga menjelaskan secara rinci metode penelitian fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup pula tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab keempat mengulas dinamika konsep diri ko-peneliti, dalam hal ini mantan PSK dengan HIV positif, data, dan hasil temuan di lapangan. Dalam bab ini juga peneliti mencoba untuk menjelaskan konsep diri yang dimiliki oleh ko-peneliti.

Bab kelima menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti.